

PENDIDIKAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN BAGI GENERASI MUDA

POLITICAL AND CITIZENSHIP EDUCATION FOR YOUTH

¹Anggi Anggraeni Kusumoningtyas, ²Yusa' Farchan, ³Cornelia Evelin Cabui

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pamulang, Kota Serang
email : ¹anggianggraenik27@gmail.com ; ²yusak1982@gmail.com , ³eveline.cabuy08@gmail.com;

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini berjudul pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi generasi muda. Pembahasan mengenai pendidikan politik dan kewarganegaraan sendiri menjadi penting untuk ditekankan mengingat masih cukup rendahnya tingkat kepedulian generasi muda terhadap kebijakan atau isu-isu politik dan kewarganegaraan. Pendidikan politik penting untuk ditekankan pelaksanaannya apalagi di tahun-tahun politik menjelang Pemilu 2024, sedangkan pendidikan kewarganegaraan dibutuhkan di tengah-tengah arus modernisasi dan westernisasi. Metode yang digunakan adalah observasi dan *forum group discussion (FGD)* dengan memberikan stimulasi pemahaman mengenai urgensi pendidikan politik dan kewarganegaraan kepada peserta kegiatan yang terdiri dari siswa dan siswi SMA Negeri 6 Kota Serang. Kegiatan ini diikuti oleh 115 orang peserta. Pemberian stimulus ini bertujuan agar para siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Serang memiliki pengetahuan politik dan kewarganegaraan yang cukup dalam merespon berbagai isu dan kebijakan politik mendasar serta kemudian mampu menjadi generasi muda yang berkarakter Pancasila. Dalam FDG, peserta dan mahasiswa didorong untuk aktif mengadakan kegiatan-kegiatan dan dialog yang membangun guna mengembangkan pengetahuan politik dan kewarganegaraan sebagai generasi muda. Hasil temuan dan kesimpulan yang didapat dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah tingkat kepedulian yang cukup baik akan politik dan kewarganegaraan masih belum terimbangi dengan tingkat pengetahuan akan pendidikan politik dan kewarganegaraan, sehingga diperlukan pendampingan secara berkala dan intens.

Kata Kunci: pendidikan politik, kewarganegaraan, generasi muda.

ABSTRACT

This community service is titled political and civic education for the younger generation. It is important to emphasize the discussion on political and civic education itself, bearing in mind the young generation's low awareness of political and citizenship policies or issues. Political education is important to emphasize its implementation, especially in the political years leading up to the 2024 Election, while citizenship education is needed in the midst of modernization and westernization. The method used were observation and forum group discussion (FGD) by providing a stimulating understanding of the urgency of political and civic education to activity participants consisting of students of SMA Negeri 6 Kota Serang. This activity was attended by 115 participants. The provision of this stimulus aims to make Serang City 6 State Senior High School students have adequate political and civic knowledge in addressing various basic political issues and policies and then be able to become a young generation with Pancasila character. In the FDG, participants and students are encouraged to actively hold constructive activities and dialogue in order to develop political knowledge and citizenship as the younger generation. The results of the findings and conclusions obtained from this community service are that a fairly good level of concern for politics and citizenship is still not matched by adequate knowledge, so that political and civic education efforts are still needed on a regular and intense basis.

Keywords: political education, citizenship, youth.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan politik dan kewarganegaraan yang baik dan benar mutlak dilakukan untuk menumbuhkan partisipasi dari setiap masyarakat, khususnya generasi muda. Nasiwan (2018) menyatakan bahwa pendidikan politik dimaknai sebagai upaya terencana untuk meningkatkan jumlah warga negara yang secara sadar berhak memilih. Tujuan pendidikan politik yang paling utama adalah membentuk kesadaran warga negara akan hak dan kewajiban konstitusionalnya. Pendidikan politik merupakan faktor penting dalam membentuk sikap politik warga negara yang mendukung berfungsinya seluruh sistem administrasi. Pendidikan politik adalah upaya sadar untuk mengubah proses sosial politik masyarakat agar memahami dan menghayati dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang akan dibangun. Manfaat pendidikan politik dapat melatih warga negara untuk meningkatkan partisipasi politiknya. Huntington (Nasiwan, 2018) mendefinisikan partisipasi politik sebagai tindakan warga negara untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Definisi ini mengasumsikan bahwa partisipasi politik mencakup aktivisme, jadi orientasi warga negara terhadap politik, pengetahuan tentang politik, minat dalam politik, perasaan tentang persaingan politik dan efektivitas politik, persepsi tentang makna politik seringkali tidak berhubungan. Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu.

Pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Pendidikan politik mensyaratkan mengandung unsur-unsur bernuansa moral. Semisal, ketaatan terhadap hukum atau aturan main, mengagungkan kepentingan publik, memproses kebijakan secara prosedural, pro rakyat banyak, penuh keteladanan, pencerahan publik, dan mengusung visi serta program yang populis. Pendidikan politik meliputi loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Pendidikan politik saat ini mempunyai tujuan pokok antara lain adalah: partisipasi politik rakyat, keterpihakan dalam konflik umum terbuka, dan keikutsertaan dalam menentukan kebijakan publik. Maka keberanian menentukan pendirian sendiri secara otonom sangat

diutamakan dalam pendidikan politik, dalam pendidikan politik untuk menentukan arah perjuangan politik ditengah banyak konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan. Jadi secara tidak langsung pendidikan politik telah mempengaruhi individu dalam perjuangan politik guna mencapai penyelesaian konflik yang menguntungkan semua pihak.

Pendidikan Kewarganegaraan juga sama pentingnya, karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan persoalan mendasar yang menyadarkan manusia akan nilai, peran sistem, aturan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat dan negara. Pendidikan kewarganegaraan ditujukan agar generasi muda menjadi pribadi yang berbudi luhur, bertanggung jawab, bermoral, dan warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya adalah pendidikan generasi muda penerus bangsa. Pendidikan kewarganegaraan harus diajarkan kepada semua generasi muda dari tingkat SD, SMP, SMA hingga universitas. Pendidikan ini penting agar generasi muda tumbuh menjadi lebih kritis terhadap hubungan nasional dan internasional, orang-orang dengan toleransi tinggi, yang cinta damai dan memahami demokrasi sehingga tujuan demokrasi Pancasila terwujud, generasi yang berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional dan internasional sehingga mampu mewujudkan peran generasi muda sebagai *agent of change* yang secara sistematis dapat mendorong perubahan sosial dan ekonomi. Para pakar pendidikan berusaha mengembalikan pentingnya pendidikan kewarganegaraan kepada generasi muda, berusaha menghadirkan kembali generasi yang tangguh, tangguh dan sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Generasi muda yang kuat meliputi aspek-aspek berikut:

- 1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, bangga sebagai warga negara indonesia, cinta lingkungan, partisipasi dalam bela negara, sikap positif terhadap negara indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
- 2) Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib di lingkungan keluarga, tertib di lingkungan akademik, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan daerah, norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum dan peradilan nasional.
- 3) Hak asasi manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM.

- 4) Kebutuhan warga negara, meliputi: gotong royong, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan berpendapat, menghargai keputusan bersama persamaan kedudukan warga negara.
- 5) Konstitusi negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, kontitusikontitusi yang pernah digunakan di indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 6) Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik.
- 7) Pancasila, meliputi: kedudukan pancasila sebagai dasar ideologi negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- 8) Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri indonesia di era globalisasi, dampak globalisai, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

II. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) antara lain sebagai berikut:

1. Tahap persiapan awal dalam Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi :
 - a. Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey ke lokasi SMA Negeri 6 Kota Serang;
 - b. Setelah survey dan mendapatkan persetujuan maka akan dilakukan observasi dan wawancara.
 - c. Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi slide dan makalah untuk peserta kegiatan
2. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini akan dijelaskan tentang materi pelayan publik;
3. Tahap pelatihan, dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat ini digunakan beberapa metode penyuluhan, yaitu:
 - a. Metode penyuluhan dan sosialisasi,
 - b. Metode diskusi tanya jawab mengenai materi yang telah disampaikan.

Adapun metode kegiatan yang digunakan dalam PKM ini adalah pembelajaran dengan memaparkan teori dan simulasi tentang pendidikan politik dan kewarganegaraan

okepada peserta kegiatan yang terdiri dari siswa di SMA Negeri 6 Kota Serang. Kegiatan ini diikuti oleh 115 orang peserta. Materi yang diberikan tentang pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi generasi muda.

Tahap Pelaksanaan Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan Bagi Generasi Muda dilaksanakan di Aula Sekolah. Kegiatan dilaksanakan dengan mengatur jadwal sesuai kesepakatan bersama pihak sekolah yang didampingi langsung oleh Kepala Sekolah. Kegiatan sosialisasi ini dibuka dengan sambutan selaku Kepala Sekolah SMAN 6 Serang selaku tuan rumah yang mendampingi kegiatan kesiswaan tersebut. Materi yang diberikan diawali dengan memberikan pemahaman berkaitan dengan politik dan kewarganegaraan. Materi lebih kepada penyampaian materi yang berkaitan dengan pendidikan politik dan kewarganegaraan, dalam arti pada saat ini ditingkat keikutsertaan siswa dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan partisipasi politik dan berkewarganegaraan. Berikut adalah tahap kegiatan yang dilakukan:

- i. Ketua dan anggota tim melakukan rapat secara daring untuk mendiskusikan tema pengabdian kepada masyarakat.
- ii. Survey ke lokasi yaitu ke SMA Negeri 6 Kota Serang untuk mengurus perizinan menentukan tempat kegiatan dan waktu pelaksanaan.
- iii. Diskusi dengan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Serang.
- iv. Menyiapkan kelengkapan pengabdian seperti mendesain dan mencetak spanduk, serta menyiapkan administrasi dan perlengkapan protokol kesehatan.
- v. Tim pengabdian melaksanakan pengabdian.

Kegiatan PKM dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari kegiatan PKM yang telah dilaksanakan. Berikut merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan PKM, terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PKM

Waktu Kegiatan	Jenis Kegiatan	Detail Kegiatan
Kamis, 18 Juli 2023	Persiapan	a. Tim dosen PKM mengunjungi Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Serang untuk berdiskusi mengenai kegiatan PKM yang akan dilakukan; b. Tim dosen PKM mempersiapkan

		<p>peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan PKM di lokasi kegiatan PKM;</p> <p>c. Tim dosen PKM memastikan jumlah peserta yang akan hadir ke Ruang Aula SMA Negeri 6 Kota Serang.</p>
Jumat, 19 Juli 2023	Pelaksanaan Kegiatan	<p>a. Tim dosen PKM melakukan briefing sebelum pelaksanaan kegiatan PKM;</p> <p>b. Registrasi peserta PKM;</p> <p>c. Pembukaan kegiatan PKM oleh Ketua PKM dan Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Serang;</p> <p>d. Kegiatan PKM berupa pendidikan politik dan kewarganegaraan bagi generasi muda;</p> <p>e. Siswa diminta praktik sebagai warga negara yang sedang mengkritik sekaligus memberikan masukan kepada pengambil kebijakan politik;</p> <p>f. Pelaksanaan tanya jawab terhadap siswa terkait pengetahuan politik dan kewarganegaraan;</p> <p>g. Foto bersama dan pemberian plakat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Serang;</p> <p>h. Penutupan kegiatan PKM.</p>
Senin, 4 Maret 2023	Evaluasi Kegiatan	<p>a. Tim dosen mengunjungi SMA Negeri 6 Kota Serang untuk membahas mengenai evaluasi kegiatan PKM yang telah dilaksanakan;</p> <p>b. Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Serang memberikan saran dan</p>

		menyampaikan tanggapan dari para siswa yang telah mengikuti kegiatan PKM.
--	--	---------------------------------------------------------------------------

Dalam melakukan pelaksanaan pengabdian ini, tim telah melakukan observasi langsung dengan mendatangi lokasi pengabdian untuk memperoleh data, menggali dan mengidentifikasi masalah, dan memberikan solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh mitra, serta akan menawarkan kerjasama sebagai solusi. Metode pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan ini disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenai keberadaan pendidikan politik di Indonesia yang secara formal dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan sebenarnya memiliki landasan hukum. Pasalnya, Amanat Pendidikan Politik (PKN) tertuang dalam kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah dalam UU No. 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini, khususnya Pasal 37 Bab X, antara lain menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah harus memuat kewarganegaraan. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan undang-undang ini, tujuan diselenggarakannya pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk siswa menjadi manusia yang memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air.

Subjek kegiatan pendidikan politik ialah setiap orang yang tengah belajar atau siswa. Sekolah, madrasah, partai politik, dan lembaga tertentu lainnya adalah tempat belajar. Pada saat yang sama, "guru" adalah penyelenggara semua proses pembelajaran politik. Guru bukanlah satu-satunya sumber informasi, karena semua orang yang mempelajari politik juga ikut serta dalam penyampaian informasi. Sebagai organisator, tanggung jawab guru adalah:

1. Memberikan jalan dan fasilitas kemudahan, agar para siswa bisa mendapatkan informasi yang akurat;
2. Melatih siswa berfikir kritis dan mandiri (menjadi pribadi otonom);
3. Mendorong siswa bertingkah laku/berbuat politik lurus dan benar, sesuai dengan naluri kemanusiaannya serta hati nuraninya yang bening. (Kartini Kartono, 2009)

Semangat pendidikan politik adalah “*politische engagement*” (keterlibatan politik), yaitu partisipasi dalam peristiwa politik dan peran partisipasi dalam menentukan kebijakan politik. Artinya, tujuan pendidikan politik pada dasarnya adalah tujuan bangsa/warga negara. Jika tidak demikian, sudah cukup pendidikan politik dalam bentuk perilaku menipu terhadap masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, tim PKM memberikan penjelasan mengenai tema kegiatan, yaitu pendidikan politik dan kewarganegaraan. Pendidikan politik dalam hal ini sering disebut dengan istilah *political forming* atau *politische bildung*. *Forming* mengandung makna bahwa pendidikan politik di dalamnya terkandung intensitas untuk membentuk insan politik yang menyadari status dan kedudukan politiknya di tengah masyarakat, sedangkan *bildung* terkandung sebuah makna bahwa pendidikan politik adalah pendidikan diri sendiri, menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran penuh tanggung jawab untuk menjadi insan politik. memandang pendidikan politik sebagai usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Dalam organisasi kesiswaan jarang karena lebih tertarik mengikuti kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik dan kewarganegaraan. Di lokasi PKM kita melihat potensi yang baik, dalam arti masih banyak minat siswa dalam mengikuti kegiatan pendidikan politik dan kewarganegaraan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, namun hanya sebatas anggota pasif saja, tanpa ada keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan di dalamnya. Setelah penyampaian materi pendidikan politik dan kewarganegaraan dilanjutkan dengan penyampaian materi praktik simulasi dimana siswa diminta praktik sebagai warga negara yang sedang mengkritik sekaligus memberikan masukan kepada pengambil kebijakan politik, terlihat pada gambar 1 berikut;



Gambar 1. Kegiatan PKM di SMA Negeri 6 Kota Serang

Tim PKM melaksanakan pelatihan partisipatif politik/kesadaran politik. Dalam tahapan ini dari 115 peserta diminta sukarelawan 3 orang mengajukan sebagai

pengkritik sekaligus pemberi masukan terhadap salah satu contoh kebijakan politik di Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan tanya jawab terhadap siswa terkait pengetahuan politik dan kewarganegaraan. Dari interaksi ini dapat tercipta proses kesadaran politik diantara pada siswa dan guru yang terlibat.

KESIMPULAN DAN SARAN

- **Kesimpulan**

Secara umum, tingkat kepedulian siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Serang sebagai generasi muda akan politik dan kewarganegaraan sudah cukup baik. Akan tetapi, tingkat kepedulian atau *awareness* ini belum seimbang dengan pengetahuan yang memadai sehingga masih diperlukan upaya pendidikan politik dan kewarganegaraan secara berkala dan intens.

- **Saran**

Kegiatan pengabdian berupa pendidikan politik dan kewarganegaraan seperti ini dapat dilakukan secara berkala dan intens selama setidaknya 2 hingga 3 kali lagi. Setelahnya, perlu juga dilakukan di lokasi yang berbeda dengan sasaran yang lebih luas dan lebih membutuhkan pendidikan politik dan kewarganegaraan. Dengan demikian, *awareness* dan pengetahuan para generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya akan politik dan kewarganegaraan dapat meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang terdiri atas dosen dan mahasiswa/I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sutomo mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Serang, para guru, dan jajaran staf yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian ini. Tidak lupa khususnya para siswa dan siswi SMA Negeri 6 Kota Serang yang telah sangat antusias mengikuti kegiatan ini hingga memenuhi aula sekolah. Berikut merupakan beberapa foto kegiatan PKM di SMA Negeri 6 Kota Serang:

DAFTAR PUSTAKA

- Endarti, Esa. (2011). Kebijakan Publik dan Reformasi Administrasi: Studi Kasus pada Kabupaten Jembrana. *Governance, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol.2, No.1. Edisi April 2011.
- Gilbert, Paul. 1998. *The Philosophy of Nationalism*. USA: Westview Press.
- Hamisa, Wilda., & Murdiono, Mukhamad. (2018). Peran PKN Sebagai Pendidikan Politik dalam Membangun Sikap Demokratis dan Partisipasi Siswa dalam Organisasi di SMA. *Jurnal Harmoni Sosial*.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2011. Inovasi Pelayanan Publik Setengah Hati: Studi Pelayanan Publik di SAMSAT Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol.15, No.1. Edisi. Juli-September.
- Kartono, Kartini. 1996. *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju.
- Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik: Sebagai Bagian Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2007, 16 Juni). *Citizen Charter (Kontrak Pelayanan): Pola Kemitraan Strategis untuk Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik*. Makalah *JURNALILMU-SOSIAL-DAN-ILMU-POLITIK Wasisto Raharjo Jati, Kewargaan Inklusif sebagai Paradigma Alternatif Pelayanan Publik*. disampaikan di Seminar Persadi, Yogyakarta.
- Maani, Karjuni. 2010. Citizen Charter: Terobosan Baru dalam Penyelenggaraan Layanan Publik, *Jurnal Tingkap*, Vol.6, No.2.
- Nasiwan. 2018. *Prospek Pendidikan Politik di Era Reformasi*. Yogyakarta: HUMANIKA.
- Pratikno. 2005. *Good Governance & Governability*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.8, No.3. Edisi Juli-September.
- Robert, Robertus & Hendrik Tobi. 2014. *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan: Dari Marx sampai Agamben*. Jakarta: Penerbit Marjin Kiri.
- Seidle, Leslie. 1995. *Rethinking the Delivery of Public Services to Citizens*. IRPP Press.
- Sumanto, Djoko, & Haryati, Amelia. 2021. *Pendidikan Politik*. Unpam Press: Tangerang Selatan.